

BAB IV
PEMBAHASAN
PROSES STRATEGI DAN TAHAPAN KRONOLOGIS KOSOVO DALAM
MENCAPAI KEDAULATAN HINGGA BERUJUNG PADA DEKLARASI
KEMERDEKAAN

Bab ini merupakan ruang pembahasan secara teoritik atas pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam karya skripsi berjudul **Strategi Republik Kosovo dalam Proses Mencapai Status Kedaulatannya pada Tahun 2008**. Secara mendalam penulis akan memberikan analisis- analisis untuk menjelaskan alasan substansial terkait bagaimana proses strategi Kosovo dalam mencapai status kedaulatannya pada tahun 2008. Kerangka konsep negosiasi yang dikemukakan oleh William I. Zartman menjadi salah satu unit analisa teoritik guna menjawab mengenai proses strategi Kosovo dalam mencapai kedaulatannya. Bahwa, proses negosiasi menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dalam proses menemukan titik temu antar kedua belah pihak terkait dengan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Adanya keterlibatan banyak pihak yang turut serta dalam mendukung proses negosiasi antar pihak yang bertikai agar memberikan dampak keuntungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian, memperkuat konsep negosiasi yang dikemukakan oleh Russell Korobkin. Sehingga analisa mendalam mengenai proses negosiasi dalam kasus kedaulatan Kosovo menjadi lebih mendalam.

Namun, ternyata dengan upaya proses negosiasi dalam kasus kedaulatan Kosovo tidak menemukan titik temu yang berarti. Hal ini dikarenakan tujuan dan kepentingan maupun upaya beberapa mediator yang menjadi penengah dalam proses negosiasi tidak dapat mengikat secara kuat terhadap pihak-pihak yang bertikai. Sehingga, dibutuhkan adanya unit analisa konsep lainnya yakni konsep tindakan sepihak. Konsep tindakan sepihak yang dikemukakan dalam *Second Report on Unilateral Acts* yang diterbitkan oleh *International Law Commission* (ILC), memberikan definisi bahwa istilah *unilateral legal act* digunakan makna bahwa *unilateral declaration* yang merupakan sebuah pernyataan kehendak yang independen dan dibuat oleh satu atau lebih negara yang juga berhubungan dengan negara yang lain, masyarakat internasional secara keseluruhan atau sebuah organisasi internasional dengan maksud untuk menimbulkan kewajiban dan akibat internasional. Sehingga, dengan buntutnya proses negosiasi antar pihak yang ada dalam kasus kedaulatan Kosovo, memberikan dampak pada upaya otoritas Kosovo melakukan tindakan sepihak untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008. Hal ini berakibat pada kewajiban-kewajiban internasional yang timbul serta permasalahan politik mengenai status kedaulatan/kemerdekaan tersebut.

Pada bagian ini penulis juga membahas mengenai tahapan secara kronologis kemerdekaan Kosovo ditinjau dari beberapa proses dan strategi yang telah dilakukan. Dengan memberikan analisis pembahasan mengenai tahapan secara kronologis fenomena terjadinya deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, maka penulis juga kembali mengulas dan memaparkan latar belakang kemunculan isu kedaulatan Kosovo. Diharapkan dengan alur pembahasan tersebut, akan

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta analisa yang lebih mendalam. Penulis juga akan memaparkan beberapa strategi yang dilakukan oleh Republik Kosovo untuk mendapatkan status kedaulatannya hingga berujung pada fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008. Serta pemaparan mengenai beberapa fakta dinamika Kosovo dalam melakukan usaha deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008.

A. Dinamika Kosovo dalam Melakukan Deklarasi Kemerdekaan Secara Sepihak (*Unilateral*)

Gejolak politik mengenai isu kedaulatan yang dihadapi oleh Kosovo mengakibatkan banyak pihak turut serta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga berbagai pihak berupaya secara maksimal guna menanggulangi timbulnya dampak sosial yang besar terhadap rakyat Kosovo atas kedaulatan yang dituntut oleh mayoritas kelompok etnis Kosovo-Albania. Keberadaan kelompok masyarakat etnis Kosovo-Albania menjadi salah satu faktor yang vital dalam perjuangan rakyat Kosovo dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaannya.

Masuknya keterlibatan asing melalui NATO melawan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Federasi Republik Sosialis Yugoslavia (SFRY) dalam kurun waktu Maret hingga Juni tahun 1999¹, diikuti dengan adanya pengesahan terhadap salah satu Resolusi Dewan

¹ Independent International Commission on Kosovo, *The Kosovo Report* (Oxford: Oxford Scholarship, 2000), hlm. 20-23;
ditambahkan dengan buku: Richard Falk, *Achieving Human Rights* (New York: Routledge, 2009), hlm. 168-170

Keamanan PBB No. 1244 pada tanggal 10 Juni 1999.² Resolusi tersebut berimbas pada diberlakukannya keterlibatan pihak dunia internasional terhadap kasus Kosovo sekaligus pembentukan dasar mengenai upaya pencapaian kedaulatan Kosovo. Pembentukan tersebut meliputi beberapa hal, yakni: fungsi administrasi bagi Kosovo, mendukung status kedaulatan, pembentukan status bagi rakyat sipil, sekaligus mendukung substansi otonomi yang lebih luas dan pemerintahan berdaulat bagi Kosovo.

Kosovo pada faktanya merupakan sebuah wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Republik Serbia. Secara administratif, wilayah Kosovo merupakan bagian dari salah satu provinsi yang memiliki status otonomi bersama dengan Metohija, yang kemudian dikenal dengan Provinsi Kosovo dan Metohija.³ Komposisi demografis penduduk Kosovo yang didominasi oleh 100.000 kelompok etnis mayoritas Kosovo-Albania. Sementara jumlah penduduk yang lainnya sejumlah 100.000 merupakan gabungan dari beberapa kelompok minoritas yang ada di wilayah Serbia, seperti: etnis Kosovo-Serbia, etnis Roma, etnis Ashkali dan etnis Turki.⁴

Namun, pada tanggal 17 Februari 2008, Parlemen Kosovo secara unilateral mengadopsi resolusi yang menandai permulaan kedaulatan dan kemerdekaan bagi Kosovo. Deklarasi kemerdekaan yang dikumandangkan dalam Parlemen Kosovo, menjamin bahwa Kosvo akan menjadi negara

² C. L. Sriram, O. Martin-Ortega dan J. Herman, *War, Conflict and Human Rights* (London: Routledge, 2010), hlm. 69-72

³ Provinsi Otonomi Khusus Kosovo dan Metohija (Kosmet) dibentuk pada tahun 1990 oleh pemerintah Serbia dan ditetapkan dalam Konstitusi Serbia guna menanggulangi usaha kemerdekaan di Kosovo

⁴ Noel Malcolm, *Kosovo: A Short History* (Basingstoke: MacMillan, 1998), hlm. 204-280

yang merdeka, berdaulat dan berhak untuk melakukan segala urusan dalam negeri maupun urusan keterkaitannya dalam mencari dukungan dari dunia internasional.⁵ Hal ini diperkuat dengan upaya Kosovo yang mencari dukungan dengan mengajukan keanggotaan dalam Sidang Umum PBB dan juga sekaligus peninjauan atas fenomena tersebut oleh *International Court of Justice* (ICJ) dari segi hukum internasional.

Peristiwa tersebut tentu menimbulkan dinamika bagi dalam negeri Kosovo maupun dunia internasional, khususnya hubungannya dengan pemerintah Republik Serbia. Kosovo berdalih bahwa upaya yang telah diraih dalam mendeklarasikan kemerdekaan merupakan hal yang secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional. Hal ini sejalan dengan upaya mayoritas rakyat Kosovo yang menuntut agar hak-hak kedaulatan atas Kosovo dikembalikan pasca peristiwa penghapusan otonomi secara unilateral oleh pemerintah pusat Republik Serbia. Sehingga, Kosovo menganggap bahwa deklarasi kemerdekaan merupakan ujung dari kedaulatan yang dapat diraih kembali oleh Kosovo dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan norma hukum internasional.

Sementara, pasca dilakukannya kemerdekaan Kosovo, respons pemerintah Serbia sangat menentang atas fenomena tersebut.⁶ Republik Serbia secara resmi menolak dan mengecam keras tindakan yang dilakukan

⁵ Resolusi Majelis Umum PBB Sidang ke-63/3, *UN Doc. A/RES/63/3* pada tanggal 08 Oktober 2008

⁶ BBC News Online (UK), "Kosovo MPs proclaim independence", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm>, pada 25 Mei 2016 pukul 07.30 WIB

oleh Kosovo⁷, karena menciderai proses negosiasi yang terjalin antar kedua otoritas. Kecaman tersebut berakibat pada upaya Republik Serbia dan Yugoslavia dalam menggagalkan segala usaha dunia internasional untuk mendukung legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo. Namun, upaya tersebut mendapatkan respons yang sangat cepat dari dunia internasional akan kedaulatan dan kemerdekaan Kosovo. Sehingga, hal ini membutuhkan keterlibatan NATO dan PBB dalam upaya mencegah kekerasan maupun tindakan bersenjata yang dilancarkan oleh pemerintah Serbia kepada rakyat Kosovo.

Peristiwa tersebut menghasilkan sebuah tuntutan yang mendasar yakni hak atas menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) bagi sebuah bangsa untuk mendapatkan kedudukan, kedaulatan sekaligus kemerdekaan.⁸ Permasalahan mengenai tuntutan rakyat Kosovo yang mengklaim bahwa seluruh bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal dasar dan diakui kedudukannya dalam statuta hukum internasional.⁹ Dalam statuta tersebut, terdapat beberapa poin yang mendasari bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak alamiah sebuah bangsa guna membentuk kedaulatan atas sebuah kemerdekaan negara-bangsa.

⁷ Richard Meares, "Serbia charges Kosovo leaders with treason", diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-kosovo-serbia-treason-idUSHAM84253620080218>, pada 28 Oktober 2016, pukul 07.43 WIB

⁸ James Summers (Ed), *Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011), hlm. 57

⁹ Lampiran pada berkas Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB No. 2625, *UN Doc. A/RES/2625* pada tanggal 24 Oktober 1970

Berdasarkan hasil Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tahun 1970, ada 4 (empat) poin yang mendasari mengenai hal atas kemerdekaan dengan dalih menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*), yakni: *pertama*, bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa merupakan hakikat alamiah yang dapat dicapai dengan keputusan secara bersama dalam sebuah kelompok. Hakikat ini menjadi dasar bahwa keberadaan menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa adalah hal yang hakiki guna memenuhi kebutuhan hajat rakyat semesta sebuah bangsa.¹⁰ *Kedua*, kelompok yang secara bersama menuntut kedaulatan harus menempuh berbagai proses dan cara yang legal sebelum mencapai pada deklarasi kemerdekaan.¹¹

Hal yang ketiga, adalah bahwa hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) haruslah bebas dari segala macam intervensi pihak eksternal. Sehingga usaha dalam mencapai kedaulatan merupakan usaha yang hendak dicapai secara kolektif dan muncul atas dasar keinginan kelompok secara internal, tanpa ada ikut campur maupun intervensi dari pihak luar. *Keempat*, hal ini berkaitan dengan upaya kesadaran kelompok masyarakat yang berupaya memperoleh kedaulatan maka harus sadar akan beberapa aspek bernegara dan berbangsa. Beberapa aspek tersebut antara

¹⁰ Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB No. 2709, *UN Doc. A/RES/2709* pada tanggal 14 Desember 1970

¹¹ Kaiyan Kaikobad, *Self-determination, Territorial Disputes and International Law: An Analysis of UN and State Practice*, dalam jurnal *Geopolitics and International Boundaries* volume 01 tahun 1996, hlm. 32-33;

ditambahkan dengan jurnal: Stephen Ratner, *Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States*, dalam jurnal *American Journal of International Law* volume 90 tahun 1996, hlm. 591-592

lain: sistem politik yang madani dan matang bagi urusan pasca menuntut kemerdekaan, yang diikuti dengan kesadaran mengenai upaya membentuk sistem ekonomi, sosial-budaya serta identitas bangsa.

Dinamika perjuangan hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) oleh bangsa Kosovo menjadi sebuah tahapan fenomena yang mendasar dalam pencapaiannya untuk mendapatkan sebuah kedaulatan. Sehingga dibutuhkan beberapa cara yang mendasar guna menganalisa dinamika yang ada, berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan internasional yang berlaku. Sehingga, hal-hal yang mendasar yang harus dicapai oleh Kosovo, diantaranya: *pertama*, status Kosovo sebelum melakukan kemerdekaan merupakan wilayah yang menjadi bagian dari sebuah negara merdeka-berdaulat, yakni Republik Serbia. Walaupun pada dasarnya pemerintahan PBB atas nama UNMIK berlaku hingga sebelum fenomena terjadi, yakni tanggal 16 Februari 2008. *Kedua*, bahwa wilayah Kosovo merupakan sebuah wilayah yang memiliki kekayaan atas keberagaman demografis komposisi penduduk yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan agama gejera Ortodox Serbia. Sehingga pengaruh yang kuat oleh pemerintah Serbia pasca peristiwa kemerdekaan, tetap akan terjadi pada hal urusan keagamaan, walaupun status kemerdekaan Kosovo masih memiliki status yang tidak valid.¹²

¹² James Summers (Ed), *Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011), hlm. 66

Hal *ketiga*, adalah tidak adanya identitas secara kelompok yang dibentuk secara resmi guna membendung aspirasi penuntutan atas kemerdekaan rakyat Kosovo. Sehingga berakibat pada tidak kuatnya kedudukan aspirasi rakyat Kosovo apabila tetap melakukan tindakan deklarasi kemerdekaan.¹³ *Keempat*, adalah identitas mengenai bangsa yang berhak mengklaim atas wilayah Kosovo sudah bergulir sejak pemerintah Yugoslavia. Dimana identitas rakyat Kosovo belum dapat ditetapkan sebagai sebuah bangsa yang berhak untuk melakukan pendudukan maupun menghuni secara legal atas wilayah Kosovo, melainkan hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah kedatangan etnis Kosovo-Albania dan Kosovo-Serbia serta beberapa etnis minoritas lainnya.¹⁴ *Kelima*, terdapatnya tindakan upaya gerakan gerilya melawan pemerintahan Serbia yang menciderai upaya menentukan nasib sendiri secara damai sesuai hukum internasional.

Beberapa hal tersebut menjadikan dinamika perjuangan upaya kemerdekaan Kosovo semakin rumit apabila ditelisik dengan hukum dan tatanan perundang-undangan internasional. Namun, Kosovo tetap bersikeras bahwa upaya mencapai kedaulatan yang berujung pada peristiwa kemerdekaan adalah hakikat sebuah bangsa guna memenuhi kebutuhan bersama. Beberapa faktor eksternal yang ikut terlibat dalam proses negosiasi antar kedua pemerintah memberikan hasil yang nihil. Sehingga

¹³ James Summers (Ed), *Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011), hlm. 66

¹⁴ Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 53-54

upaya kemerdekaan Kosovo tetap dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam bagi kedaulatan sebuah bangsa yang telah ada (Republik Serbia)¹⁵, atas sebuah calon negara yang baru Republik Kosovo.¹⁶

B. Strategi Kosovo dalam Mendapatkan Kedaulatannya pada Tahun 2008

1. Negosiasi Antara Kosovo-Serbia

Ditetapkannya Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai Laporan Kai Eide (*Special Envoy for Kosovo Review*) pada tanggal 24 Oktober 2005¹⁷, Kai Eide melaporkan bahwa pasca melakukan peninjauan terhadap segala aspek di Kosovo, upaya negosiasi maupun dialog yang komprehensif antar kedua belah pihak akan sulit dicapai. Eide menambahkan bahwa untuk mencapai proses negosiasi, maka diperlukan beberapa cara yang relevan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Proses negosiasi mengenai status Kosovo menjadi perihal yang rumit dan berbeda dengan kasus negara-negara bekas Yugoslavia yang lainnya. Sehingga, dibutuhkan upaya yang damai dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedaulatan Kosovo.¹⁸

¹⁵ Laporan Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, *UN Doc. S/2007/168*, pada tanggal 26 Maret 2007

¹⁶ Kosovo and the Comprehensive Proposal for the Kosovo future Status Settlement (The Ahtisaari Plan), *UN Doc. S/2007/168* lampiran bagian 1, pada tanggal 26 Maret 2007

¹⁷ Pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-5289, *UN Security Council Document, S/PV5289*, pada tanggal 24 Oktober 2005;

ditambahkan dengan dokumen: Pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-5290, *UN Security Council Document, S/PV5290*, pada tanggal 24 Oktober 2005

¹⁸ James Ker-Lindsay, *Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2009), hlm. 25

Dalam laporan lainnya yang disampaikan oleh Søren Jessen-Petersen, yang merupakan Sekretaris-Jenderal Perwakilan Khusus PBB mengenai permasalahan Kosovo, memberikan persetujuan bahwa laporan yang diberikan oleh Kai Eide merupakan hal yang muthlak untuk diikuti oleh komunitas internasional yang terlibat dalam penyelesaian kasus kedaulatan Kosovo. Petersen menambahkan bahwa dengan diberlakukannya Laporan Eide, maka disimpulkan bahwa UNMIK akan tetap menjaga stabilitas keadaan politik yang ada di wilayah Kosovo hingga proses negosiasi antar pihak dapat dipertemukan.

Pernyataan anggota lainnya, yakni Koštunica, memperkuat kedudukan Kai Eide dan Søren Jessen-Petersen. Bahwa permasalahan Kosovo menjadi hal yang sangat sensitif dan perlu diperhatikan secara teliti, karena menyangkut pada kehidupan rakyat sipil Kosovo. Koštunica menambahkan bahwa sebanyak 60% dari kelompok masyarakat etnis Kosovo-Serbia telah terusir secara paksa dari wilayah Kosovo akibat konflik yang berkepanjangan mengenai isu kedaulatan. Sehingga, isu kemanusiaan dan politik tidak dapat dikesampingkan dalam melihat fenomena/peristiwa tuntutan kemerdekaan Kosovo.¹⁹

Dalam Pertemuan Dewan Keamanan pada tanggal 24 Oktober 2005, menutup laporan Kai Eide mengenai peninjauan atas

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26

kasus Kosovo, maka hendaknya dibutuhkan keterlibatan dunia internasional dalam menengahi proses negosiasi yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai guna mencapai tujuan kesepakatan bersama. Sehingga, pada akhirnya Eide menekankan bahwa perlunya penetapan suatu badan misi khusus yang bertanggungjawab atas permasalahan Kosovo, terlebih mengenai isu kedaulatan yang berakibat pada kekerasan terhadap rakyat sipil Kosovo.

Berdasarkan Pertemuan Dewan Keamanan pada tanggal 24 Oktober 2005, maka secara kolektif Dewan Keamanan PBB membentuk badan misi khusus untuk menangani permasalahan di Kosovo, bernama *United Nations Special Envoy for Kosovo* (UNOSEK)²⁰ yang berkedudukan di Wina²¹. Pembentukan UNOSEK yang kemudian diketuai oleh Martii Ahtisaari, seorang mantan presiden Finlandia, berhasil disepakati oleh pihak Serbia maupun Kosovo. Ahtisaari secara gencar mengumandangkan untuk segera diberlakukannya dan dicapainya kesepakatan antar kedua otoritas yang ada, yakni: Kosovo dan Serbia dalam kasus kedaulatan Kosovo.

Dalam perkembangannya, keberadaan UNOSEK dan Martii Ahtisaari berusaha untuk menciptakan sebuah kesepakatan yang

²⁰ Surat Pernyataan Sekretaris-Jenderal PBB Koffi Annan kepada Dewan Keamanan PBB, S/2005/709, pada tanggal 10 November 2005

²¹ Marc Weller, *The Vienna Negotiations on the Final Status of Kosovo*, International Affairs Journal Volume 84 Nomor 4 pada tahun 2008, hlm. 664.

dikenal dengan *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* sebagai sebuah awal dari sebuah negosiasi yang lebih komprehensif dimasa mendatang. Namun, upaya dalam mencapai *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* hanya sampai pada proses pengumpulan fakta-fakta dan pelaporan kepada Dewan Keamanan PBB. Sehingga, dampak dari *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* tidak memberikan kesepakatan yang berarti bagi Kosovo maupun Serbia.

Keterlibatan banyak pihak faktor eksternal yang menjadikan proses negosiasi mengenai status Kosovo menjadi lebih rumit. *Contact Group* dan PBB yang secara gencar berupaya untuk mengingatkan agar pemerintahan Serbia dibawah pemerintahan Tadić serta otoritas Kosovo dibawah komando Rugova, saling mempertemukan tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai dalam meja perundingan. Namun, ternyata dibalik upaya organisasi maupun lembaga internasional untuk mencoba menengahi konflik, muncul Rusia sebagai sebuah negara yang mendukung kedudukan Serbia dalam perundingan yang akan dilakukan.²²

Kemunculan Rusia yang mendukung secara keras posisi Serbia diikuti oleh tindakan Amerika Serikat dalam mendukung kedudukan Kosovo. Sehingga rivalitas kedua negara adidaya justru

²² James Ker-Lindsay, *Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2009), hlm. 29

semakin Nampak nyata dalam proses perundingan yang akan dilakukan guna mempertemukan tujuan dan kepentingan bersama. Keterlibatan lembaga *Organisation for Cooperation and Security in Europe* (OSCE), gagal dalam mengupayakan eskalasi kepentingan diantara kedua belah pihak. Hal ini semakin diperburuk dengan kegagalan pertemuan Helsinki yang pertama oleh UNOSEK akibat dari rivalitas pendukung Kosovo dan Serbia.²³

Proses negosiasi antar kedua belah pihak berlanjut dengan dimulainya pada awal tahun 2006. Ahtisaari bertemu dengan Contact Group untuk mengingatkan bahwa dalam proses perundingan ini agar seluruh negara adidaya bersikap netral guna tercapainya kepentingan seluruh pihak yang bertikai.²⁴ Pada 20 Februari 2006, pertemuan secara resmi antara otoritas Kosovo dengan pihak Serbia berjalan untuk pertama kalinya. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang buntu dan tidak menemukan titik temu antar kepentingan dan tujuan yang ada. Sehingga, Ahtisaari mengupayakan untuk mencoba melakukan perundingan yang lebih komprehensif pada kesempatan selanjutnya.

Terdapatnya banyak perbedaan kepentingan dunia internasional yang menjadi faktor besar kegagalan perundingan UNOSEK. Ahtisaari selalu berupaya untuk menengahi seluruh

²³ *Ibid.*, hlm. 29

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30

pihak yang bertikai, namun dalam proses perundingan yang cukup lama justru menghasilkan beberapa kesepakatan yang nihil. Akibatnya, banyak gejolak politik dan sipil terjadi di wilayah ibu kota Kosovo dan ibu kota Serbia. Hal ini untuk menuntut UNOSEK agar segera menyelesaikan kasus kedaulatan Kosovo yang sudah menjadi isu sensitif sejak terjadinya Perang Kosovo tahun 1999.²⁵

Dengan buntutnya berbagai proses negosiasi awal, maka Ahtisaari berupaya melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai laporan UNOSEK sekaligus UNMIK yang akan memberikan jalan tengah bagi isu kedaulatan Kosovo. Namun, kenyataannya justru pada pertemuan tersebut laporan yang menyatakan kegagalan proses perundingan dan negosiasi semakin memperburuk keadaan. Sementara tendensi peningkatan tuntutan rakyat Kosovo agar segera dilakukan referendum atas kemerdekaan semakin meningkat di ibu kota, Prishtina.²⁶

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Ahtisaari dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2007 tidak kunjung menghasilkan kesepakatan kepada kedua belah pihak. Akibatnya, perundingan tersebut dibawa kepada ranah Dewan Keamanan PBB yang mempertemukan seluruh pihak yang bertikai, termasuk didalamnya UNMIK dan UNOSEK sebagai lembaga yang bertanggungjawab

²⁵ James Ker-Lindsay, *Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2009), hlm. 37-43

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44

secara khusus menyelesaikan permasalahan di Kosovo. Debat dan negosiasi yang berlangsung pada tingkat Dewan Keamanan PBB tidak kunjung berhasil guna menetapkan sebuah kesepakatan baku yang dapat menyelesaikan permasalahan di Kosovo. Sehingga, Ahtisaari berupaya untuk mencoba mencari jalan negosiasi lain guna mempertemukan kepentingan yang ada.²⁷

Martii Ahtisaari mencoba untuk berupaya secara keras pasca kegagalan proses negosiasi yang ditengahi oleh Dewan Keamanan PBB sepanjang bulan Januari hingga Juli tahun 2007.²⁸ Pada tanggal 1 Agustus 2007, PBB secara resmi mengumumkan akan diadakannya upaya periode negosiasi yang baru bernama Perundingan Troika (*Troika Talks*) guna membahas permasalahan dan gejolak politik di wilayah Kosovo.²⁹ Kedua belah pihak menyambut baik akan dilakukannya perundingan tahap baru tersebut. UNOSEK tetap akan menjadi badan yang bertanggungjawab guna menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kosovo.³⁰

Keberlangsungan perundingan Troika juga semakin alot dengan semakin tingginya dukungan Amerika Serikat terhadap

²⁷ Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 117-127

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63-80

²⁹ Sekretaris-Jenderal PBB menyambut baik upaya perdamaian dan negosiasi yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dalam 'New Kosovo initiative (Troika Talks)', *UN Press Release, SG/SM/11111*, 1 Agustus 2007

³⁰ James Ker-Lindsay, *Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2009), hlm. 82

Kosovo. Sementara disisi lain Rusia semakin genar untuk melakukan dukungannya terhadap Serbia. Hal ini Semakin diperburuk dengan status yang diupayakan oleh kalangan negara-negara Eropa yang semakin menyetujui keberadaan negara berdaulat Kosovo. Pada kurun waktu Agustus hingga Desember tahun 2007, perundingan Troika tidak membuahkan hasil yang nyata. Melainkan perundingan ini hanya berhasil mempertemukan kedua belah pihak yang semakin tidak bisa dicapai titik temu.³¹

Upaya Serbia dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah Kosovo digalakkan kembali dengan dibentuknya sebuah draft untuk memberikan status otonomi bagi wilayah Kosovo dan Metohija. Hal ini direspons sangat dingin oleh pihak dari Kosovo, akibat dari faktor historis yang sudah lama bahwa otonomi yang sempat diraih dan dicapai para era Yugoslavia justru dihapuskan secara paksa oleh pemerintah Serbia. Sehingga, eskalasi konflik mengenai tuntutan kemerdekaan atas kedaulatan Kosovo semakin meningkat hingga awal tahun 2008.

Kemunculan UNMIK dan UNOSEK yang menjadi penengah secara resmi dalam isu kedaulatan Kosovo nyatanya tidak memberikan implikasi dan akibat yang cukup besar terhadap titik temu kepentingan yang ada. Hal ini justru semakin meningkatkan tendensi bahwa rakyat Kosovo berhak untuk melakukan tindakan

³¹ *Ibid.*, hlm. 92

penentuan nasib masa depannya. Fakta keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi yang tidak kunjung membuahkan hasil semakin meyakinkan rakyat Kosovo akan status kemerdekaan yang dapat diraih oleh Kosovo. Hingga Perundingan Troika berakhir pada tanggal 7 Desember 2007, kesepakatan tetap tidak dapat diraih oleh kedua belah pihak dalam menangani kasus tuntutan kedaulatan Kosovo.³²

2. Deklarasi Kemerdekaan Secara Sepihak (*Unilateral*) oleh Kosovo

Bergulirnya beberapa perundingan dalam kurun waktu tahun 2005-2007, memberikan dampak yang cukup besar terhadap gejolak politik di Kosovo. Rakyat Kosovo berupaya untuk tetap menuntut adanya kemerdekaan yang mutlak bagi wilayah Kosovo. Hal ini dipelopori oleh kekuatan masa yang cukup besar dari etnis Kosovo-Albania. Hingga awal tahun 2008, perundingan akhirnya menemui kebuntuan pasca dilaporkannya hasil perundingan Troika dalam ranah Sidang Dewan Keamanan PBB.³³

Perundingan lama yang telah berlangsung tidak menyurutkan upaya rakyat Kosovo untuk menuntut kemerdekaan atas negara Serbia pada tahun 2008. Pada bulan Januari 2008, KFOR

³² *Ibid.*, hlm. 100-101

³³ Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 140-143

bersama dengan sebagian besar rakyat etnis Kosovo-Albania melakukan demonstrasi dalam skala besar di ibu kota Prishtina. Upaya ini diperkuat dengan laporan UNOSEK yang telah menghasilkan *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* guna mendukung usaha kemerdekaan bagi Kosovo.³⁴

Usaha perdamaian dalam kurun waktu Desember 2007 hingga tanggal 16 Februari 2008 telah diupayakan oleh pemerintahan Serbia guna membendung usaha rakyat Kosovo dalam melakukan kemerdekaan dan tuntutan atas kemerdekaan wilayah Kosovo dari Republik Serbia. Hal ini diperkuat dengan kemunculan tokoh besar *Kosovo Liberation Army* (KLA) Hashim Thaçi yang mengupayakan gerakan secara masif KLA terhadap terror di wilayah Kosovo. Sehingga pada akhirnya KLA berhasil mengusir sebagian besar etnis kelompok masyarakat Kosovo-Serbia dan beberapa kelompok etnis kecil lainnya dari wilayah Kosovo.³⁵

Pada bulan November tahun 2007, Kosovo mengadakan pemilihan umum terhadap jabatan anggota legislatif Parlemen Kosovo. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota letislatif Parlemen Kosovo berujung pada kemenangan LDK sebagai mayoritas partai yang berhasil mendapatkan suara. Sebanyak 60% suara berhasil diraih oleh partai LDK dalam

³⁴ Henry H. Perritt, Jr., *The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 211-213

³⁵ *Ibid.*, hlm. 141

pemilihan umum anggota legislatif Parlemen Kosovo. Kemenangan LDK menjadi peringatan bagi pemerintah Serbia, dibawah pimpinan Boris Tadić. Hal ini dikarenakan LDK sangat gencar untuk mengupayakan tercapainya kedaulatan Kosovo yang lepas dari wilayah negara Republik Serbia.³⁶

Pada hasil pemilihan umum legislatif yang memenangkan LDK, maka memberikan dampak pada pemilihan Perdana Menteri dikalangan internal anggota parlemen. Pada pemilihan Perdana Menteri, menghasilkan Hashim Thaçi keluar sebagai pemenang dan menjabat sebagai Perdana Menteri Kosovo pada November 2007. Dalam kampanyenya, Thaçi akan selalu berupaya guna mencapai kemenangan yang besar bagi rakyat Kosovo atas kedaulatan. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan tuntutan rakyat Kosovo untuk merdeka dari wilayah Serbia.

Disisi lain, pemerintah Serbia berupaya untuk memberikan upaya yang keras guna mempertahankan wilayah kedaulatannya di Kosovo. Presiden Boris Tadić memberikan serangan-serangan dan teror yang ditujukan kepada beberapa wilayah penduduk di Gojbulja, Kosovo.³⁷ Hal ini guna menekan upaya partai LDK dalam mencapai deklrasi kemerdekaan pada bulan Februari 2008.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 142-143

³⁷ Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 143

Partai LDK yang keluar sebagai partai pemenang dalam pemilihan umum November 2007, memberikan janji kampanyenya dengan gencar berupaya untuk menuntut Rencana Ahtisaari (*Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement*) yang mengisyaratkan akan kedudukan kedaulatan yang sah terhadap wilayah Kosovo guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Perdana Menteri Thaçi akhirnya memberikan tanggapan yang serius pada hasil kesepakatan Rencana Ahtisaari tersebut, sehingga gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di wilayah ibu kota Prishtina. Tuntutan rakyat Kosovo-Albania semakin besar dengan semakin gencarnya upaya Thaçi dalam merealisasikan kemerdekaan bagi Kosovo. Akibatnya pada tanggal 17 Februari 2008, Perdana Menteri Hashim Thaçi, melalui lembaga dukungan mayoritas anggota Parlemen Kosovo, mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo.³⁸

Peristiwa Deklarasi Kemerdekaan tanggal 17 Februari 2008, menjadi tonggak sejarah yang besar bagi masalah isu kedaulatan Kosovo. Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan secara sepihak (unilateral) oleh pihak Kosovo merupakan buntut dari segala proses negosiasi, perundingan dan strategi yang diusahakan oleh otoritas Kosovo sejak tahun 2005 yang tidak kunjung menemukan hasil bagi

³⁸ Henry H. Perritt, Jr., *The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 214-215

rakyat Kosovo. Upaya perdamaian yang dicoba oleh otoritas pemerintah Serbia tidak dapat menggoyahkan keinginan rakyat Kosovo untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sehingga, dukungan internasional pada Kosovo justru semakin mengalir, seiring dengan melemahnya kedudukan Serbia pasca peristiwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak.

Peristiwa deklarasi kemerdekaan tersebut memperkuat kedudukan Kosovo dalam dunia internasional dan membuktikan bahwa perjuangan dan upaya rakyat Kosovo dalam mencapai kedaulatan sudah tercapai. Dukungan dunia internasional terus mengalir terhadap upaya menjaga eksistensi Kosovo pasca terjadinya peristiwa deklarasi kemerdekaan pada 17 Februari 2008. Republik Albania pada tanggal 17 Februari 2008 langsung memberikan pernyataan resminya terhadap pengakuan kemerdekaan Kosovo. Pada tanggal 18 Februari 2008, Amerika Serikat, Inggris Raya dan Prancis juga melakukan tindakan pengakuan terhadap eksistensi keberadaan Kosovo.³⁹

Peristiwa deklarasi kemerdekaan tersebut menjadi sebuah babak baru bagi Kosovo untuk dapat mengurus segala urusan dalam negeri dengan landasan hukum internasional yang kuat. Pemerintah Serbia didukung oleh Rusia sangat mengecam tindakan deklarasi kemerdekaan Kosovo tanggal 17 Februari 2008, dan menganggap

³⁹ *Ibid.*, hlm. 217

sebagai upaya separatisme terhadap wilayah kedaulatan Serbia. Namun, dibalik berbagai kecaman yang dilancarkan oleh Serbia dan Rusia, Kosovo semakin mendapatkan dukungan atas eksistensi kemerdekaannya dari dunia internasional.⁴⁰

C. Tahapan Kronologis Kosovo dalam Mencapai Deklarasi Kemerdekaan Secara Sepihak (*Unilateral*) Tahun 2008

Fenomena deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Kosovo pada tahun 2008 dapat dianalisis menjadi sebuah tabel pemahaman kronologis yang lebih mendalam. Tabel ini berfungsi untuk memberikan tahapan kronologis yang lebih terperinci dalam melihat fenomena tuntutan deklarasi kemerdekaan oleh otoritas Kosovo. Dengan dilakukannya berbagai proses negosiasi yang melibatkan banyak pihak ikut tergabung dan berperan dalam proses penentuan kedaulatan Kosovo, justru memberikan permasalahan yang semakin dinamis. Sehingga dengan keterlibatan berbagai faktor eksternal tersebut, turut serta dalam memberikan hasil yang selalu buntu selama proses negosiasi terjadi.

Kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008 merupakan tonggak sejarah yang gemilang bagi perjuangan panjang rakyat Kosovo dalam menuntut kedaulatan. Sejak dibubarkannya pemerintahan Federasi Republik Sosialis Yugoslavia (SFRY) yang turut serta memberkikan hasil kemerdekaan bagi negara-negara bekas anggota federasi tersebut. Maka Kosovo juga

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 219-220

melakukan segala upaya untuk mencapai status kedaulatan yang final. Proses strategi yang telah dilakukan selalu berujung dengan kegagalan dalam meja perundingan (negosiasi). Namun pada akhirnya, tanggal 17 Februari 2008 Republik Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan atas kedaulatan wilayah Kosovo secara sepihak. Hal ini sebagai upaya pengukuhan kedaulatan yang sah secara hukum internasional, dengan menimbang berbagai hasil negosiasi yang selalu memberikan hasil untuk dukungan kemerdekaan Kosovo. Berikut analisis dalam bentuk tabel guna memahami tahapan kronologis Kosovo dalam melakukan deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008:

Tabel 1 Tahapan Kronologis Kosovo dalam Mencapai Deklarasi Kemerdekaan Secara Sepihak (Unilateral) Tahun 2008.⁴¹

Periode/Waktu	Peristiwa
Maret 2004	Terjadi pemberontakan dan demonstrasi secara besar-besaran di wilayah ibu kota Prishtina. Hal ini diakibatkan oleh adanya tuntutan rakyat Kosovo, khususnya masyarakat Kosovo-Albania dalam melakukan deklarasi kemerdekaan dan mencapai kedaulatan secara penuh.
3 Juni 2005	Kai Eide diangkat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan sebagai perwakilan resmi untuk melakukan peninjauan terhadap permasalahan dan situasi yang terjadi di wilayah Kosovo sejak terjadinya demonstrasi besar-besaran.
7 Oktober 2005	Kai Eide memberikan hasil peninjauan yang telah dilakukan bersama dengan timnya di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

⁴¹ James Ker-Lindsay, *Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans* (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 2009), hlm. xiii-xv

24 Oktober 2005	Dewan Keamanan PBB menerima dan melakukan dukungan penuh terhadap hasil laporan yang diberikan oleh Kai Eide beserta timnya, mengenai isu permasalahan kedaulatan yang terjadi di wilayah Kosovo. Sehingga menghasilkan ketetapan diperlukannya komunitas internasional untuk turut serta dalam mengupayakan perdamaian di wilayah Kosovo.
10 November 2005	Martti Ahtisaari, seorang mantan presiden Finlandia, diangkat secara resmi untuk menjadi ketua tim khusus PBB yang menangani kasus kedaulatan bagi Kosovo.
21 Januari 2006	Presiden Ibrahim Rugova meninggal dunia, menandai proses transisi kekuasaan dan otoritas di wilayah Kosovo dan partai Liga Demokrasi Kosovo (LDK).
31 Januari 2006	<i>Contact Group</i> yang merupakan kelompok negara yang terdiri dari: Republik Prancis, Republik Federal Jerman, Republik Italia, Federasi Rusia, Inggris Raya dan Amerika Serikat melakukan perundingan pertama untuk membahas mengenai isu kedaulatan dan masa depan Kosovo.
10 Februari 2006	Menyusul kematian Presiden Ibrahim Rugova, pemilihan umum menetapkan hasil bahwa Fatmir Sejdiu terpilih sebagai Presiden Kosovo menggantikan mendiang Presiden Ibrahim Rugova.
14 Februari 2006	Dewan Keamanan PBB melakukan perdebatan mengenai nasib kedaulatan Kosovo.
20-21 Februari 2006	Perundingan Pertama yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo.
1 Maret 2006	Bajram Kosumi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Kosovo menyusul perundingan pertama yang gagal dalam menghasilkan kesepakatan bagi Kosovo.

10 Maret 2006	Agim Çeku terpilih sebagai Perdana Menteri Kosovo yang baru oleh Parlemen Kosovo, menggantikan Bajram Kosumi yang mengundurkan diri.
11 Maret 2006	Presiden Slobodan Milošević meninggal dalam masa percobaan persidangan di Den Haag, Kerajaan Belanda.
17 Maret 2006	Perundingan Kedua yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan ini gagal dan tidak menemukan kesepakatan.
3 April 2006	Perundingan Ketiga yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan ini pun juga gagal dan tidak menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak.
3 Mei 2006	Uni Eropa menanggukkan perundingan dengan pemerintah Serbia. Menyusul tindakan Serbia yang tidak bisa kooperatif dalam melakukan perundingan mengenai isu permasalahan Kosovo.
4-5 Mei 2006	Perundingan Keempat yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan ini masih mengalami kegagalan dan tidak menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak.
21 Mei 2006	Montenegro melakukan tindakan referendum atas penentuan nasib kemerdekaan. Secara mengejutkan, hasil referendum menyatakan rakyat Montenegro menghendaki kemerdekaan penuh dari Serbia.
23 Mei 2006	Perundingan Pertama yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai

	penyelamatan warisan situs keagamaan bersejarah guna menanggulangi kerusakan fisik atas pusaka warisan tersebut.
31 Mei 2006	Perundingan Pertama yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai permasalahan ekonomi bagi pihak-pihak yang bertikai, khususnya Kosovo dengan Serbia.
20 Juni 2006	Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan secara resmi mengenai permasalahan di Kosovo.
13 Juli 2006	Pertemuan resmi Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai permasalahan di Kosovo, ditutup dan tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti.
18 Juli 2006	Perundingan Kedua yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai penyelamatan warisan situs keagamaan bersejarah guna melakukan penetapan berbagai situs yang perlu dilindungi.
19 Juli 2006	Perundingan Kelima yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan ini gagal dan tidak menemukan kesepakatan.
24 Juli 2006	Pertemuan Tingkat Tinggi di Wina, yang dilakukan oleh berbagai pihak yang turut terliat dalam kasus Kosovo. Pertemuan ini dipelopori oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK).
7 Agustus 2006	Perundingan Keenam yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan ini masih mengalami kegagalan dan tidak menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak.

8 Agustus 2006	Perundingan Pertama yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Enfoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai hak-hak masyarakat sipil.
7-8 September 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perundingan Ketujuh yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Enfoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan mengalami kegagalan dan tidak menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak, 2. Perundingan Ketiga yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Enfoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai penyelamatan warisan situs keagamaan bersejarah guna melakukan penetapan berbagai situs yang perlu dilindungi, dan 3. Perundingan Kedua yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Enfoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai hak-hak masyarakat sipil.
13 September 2006	Dewan Kemananan PBB melakukan pertemuan secara resmi mengenai permasalahan di Kosovo dan membahas berbagai dinamika yang sudah terjadi dalam beberapa proses perundingan sebelumnya.
15 September 2006	Perundingan Kedelapan yang dilakukan di Wina oleh <i>United Nations Special Enfoy for Kosovo</i> (UNOSEK) membahas mengenai proses desentralisasi wilayah Kosovo. Namun proses perundingan mengalami kegagalan dan tidak menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak.
22 September 2006	Pertemuan Dewan Kemananan PBB yang membahas mengenai permasalahan di Kosovo dan membahas berbagai dinamika yang sudah terjadi dalam beberapa proses perundingan sebelumnya., secara resmi ditutup.

28-29 Oktober 2006	Konstitusi Republik Serbia yang baru disepakati oleh seluruh anggota Parlemen Serbia dalam sebuah peristiwa referendum.
10 November 2006	Pergantian Konstitusi Republik Serbia memicu dilakukannya pemilihan umum terhadap anggota parlemen yang baru di Serbia.
13 Desember 2006	Dewan Keamanan PBB melakukan perdebatan kembali mengenai nasib kedaulatan Kosovo.
21 Januari 2007	Pemilihan umum yang dilakukan guna memilih anggota parlemen Serbia yang baru dilaksanakan.
26 Januari 2007	Pengajuan status kedaulatan dan kemerdekaan bagi Kosovo disampaikan dalam aliansi <i>Contact Group</i> .
2 Februari 2007	Pengajuan status kedaulatan dan kemerdekaan bagi Kosovo diperdebatkan oleh berbagai pihak internal <i>Contact Group</i> .
21 Februari 2007	Fase Diskusi Teknis Pertama dilakukan di Wina, menyusul kesepakatan yang diraih oleh <i>Contact Group</i> dalam menentukan status kedaulatan bagi Kosovo.
27 Februari 2007	Fase Diskusi Teknis Kedua dilakukan di Wina, menyusul belum tercapainya kesepakatan dalam Fase Diskusi Teknis Pertama.
10 Maret 2007	Pertemuan Puncak Tingkat Tinggi di Wina, yang dilakukan oleh berbagai pihak yang turut terlihat dalam kasus Kosovo. Pertemuan ini dipelopori oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK).
15 Maret 2007	Pengajuan proposal status kedaulatan bagi Kosovo oleh <i>United Nations Special Envoy for Kosovo</i> (UNOSEK) kepada Sekretaris-Jenderal PBB Koffi Annan.
19 Maret 2007	Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan resmi mengenai permasalahan di Kosovo.
26 Maret 2007	Pengajuan proposal status kedaulatan bagi Kosovo oleh <i>United Nations Special Envoy for</i>

	<i>Kosovo</i> (UNOSEK) kepada Dewan Keamanan PBB.
14-19 April 2007	Dewan Keamanan PBB mengirimkan Misi Penemuan Fakta-Fakta di wilayah Kosovo, guna memperdalam isu permasalahan Kosovo.
2 Mei 2007	Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan resmi mengenai permasalahan di Kosovo.
10 Mei 2007	Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan resmi kembali guna mengenai isu permasalahan di Kosovo.
11 Mei 2007	Draf Resolusi mengenai status proposal kedaulatan bagi Kosovo mulai dilakukan di Dewan Keamanan PBB.
14-15 Mei 2007	Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice mengunjungi Moscow, Federasi Rusia guna melakukan konsolidasi antara pemerintahan Amerika Serikat dengan pemerintahan Federasi Rusia.
15 Mei 2007	Pemerintahan Serbia yang baru telah terbentuk pasca pemilihan umum yang telah dilakukan.
6-8 Juni 2007	<i>Group of 8</i> (G8) Melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi di Republik Federal Jerman.
1-2 Juli 2007	Presiden Bush dan Presiden Putin melakukan pertemuan secara resmi di Kennebunkport, Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas konsolidasi lanjutan yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice ketika berkunjung ke Moscow.
20 Juli 2007	Upaya untuk mengesahkan Resolusi PBB digagalkan melalui veto di tingkat Dewan Keamanan oleh Federasi Rusia.
1 Agustus 2007	Diskusi Meja Bundar Baru diumumkan antar pihak yang turut memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan di Kosovo.
9 Agustus 2007	Pertemuan Troika dengan <i>Contact Group</i> , di kota London, Inggris Raya guna membahas kehendak Kosovo dan kepentingan Serbia.

10-12 Agustus 2007	Perundingan Troika Pertama (secara tidak langsung) dilakukan di ibu kota Beograd, Serbia dan ibu kota Prishtina, Kosovo.
30 Agustus 2007	Perundingan Troika Kedua (secara tidak langsung) dilakukan di Wina. Dipelopori oleh UNMIK dan mediator Martii Ahtisaari.
18-19 September 2007	Perundingan Troika Ketiga (secara tidak langsung) dilakukan di London.
27 September 2007	Pertemuan Troika dengan <i>Contact Group</i> , di kota New York, Amerika Serikat dilakukan guna membahas hasil dari Ketiga Perundingan Troika (secara tidak langsung) dan membahas pertemuan resmi secara tatap muka antar pihak dalam kurun waktu setelah pertemuan Troika dengan <i>Contact Group</i> .
28 September 2007	Perundingan Troika Keempat (Pertemuan Pertama secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di New York. Merupakan tahapan awal pengenalan pihak-pihak yang bertikai oleh UNMIK dan Martii Ahtisaari.
14 Oktober 2007	Perundingan Troika Kelima (Pertemuan Kedua secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di Brussels, Belgia. Merupakan tahapan dalam menyampaikan kepentingan kedua belah pihak yang bertikai.
22 Oktober 2007	Perundingan Troika Keenam (Pertemuan Ketiga secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di Wina. Merupakan tahapan awal dalam proses negosiasi kedua belah pihak yang bertikai.
5 November 2007	Perundingan Troika Ketujuh (Pertemuan Keempat secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di Wina. Merupakan tahapan lanjutan dalam proses negosiasi kedua belah pihak yang bertikai.
20 November 2007	Perundingan Troika Kedelapan (Pertemuan Kelima secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di Brussels,

	Belgia. Merupakan tahapan lanjutan dalam proses negosiasi kedua belah pihak yang bertikai. Tahapan ini juga penyampaian kehendak masing-masing pihak dalam permasalahan kedaulatan Kosovo.
26-28 November 2007	Perundingan Troika Kesembilan (Pertemuan Keenam secara resmi dan tatap muka antar Serbia dan Kosovo) dilakukan di Wina. Merupakan tahapan dalam pembahasan nota keberatan dan proses negosiasi antar pihak yang bertikai.
3 Desember 2007	Perundingan Troika Kesepuluh (secara tidak langsung) dilakukan di ibu kota Beograd, Serbia dan ibu kota Prishtina, Kosovo. Menyusul kesepakatan yang tidak dapat kunjung dicapai oleh kedua belah pihak.
7 Desember 2007	Troika menyampaikan hasil beberapa perundingan yang telah dilakukan oleh UNIK dan Martii Ahtisaari di depan Dewan Keamanan PBB.
14 Desember 2007	Dewan Eropa menyetujui untuk memperkuat kedudukan <i>European Union Special Representative</i> (EUSR) dan sekaligus juga dengan membentuk misi <i>European Security and Defence Policy</i> (ESDP) yang mengelola isu dalam ranah hukum. Kemudian, badan ini lebih dikenal dengan <i>European Union Rule of Law in Kosovo</i> (EULEX).
19 Desember 2007	Dewan Keamanan PBB melakukan debat dalam isu permasalahan Kosovo.
17 Februari 2008	Menyusul proses negosiasi yang selalu gagal, otoritas Kosovo secara sepihak melakukan deklarasi kemerdekaan di ibu kota Prishtina. Peristiwa ini dilakukan di dalam Parlemen Kosovo, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hashim Thaçi.